

STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA DUMAI

Oleh : Nurul Serlyan Syafitri

Email : nurulserlyan11@gmail.com

Pembimbing : Dr. Adianto, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

The construction of road infrastructure in Dumai City is an important basic infrastructure to improve considering the city of Dumai has strategic value as the gateway to the coast of Sumatra, and is supported by the vision and mission of Dumai City. Quality Improvement & Quantity of road Infrastructure development aims to optimize services to the community as well as to encourage the development of Dumai City in accordance with the City Strategic Plan going forward taking into account the impact as a result of considerable City changes. But in reality the construction of road infrastructure in Dumai City has not been done optimally, this is due to several factors found in the field. This research aims to find out the strategy of road infrastructure development in Dumai City and the inhibitory factor of road infrastructure development in Dumai City. This research uses qualitative methods with a descriptive case study approach. Informants are taken using purposive sampling. Data collection is done with observations, interviews, and documentation later in the analysis based on the formulation of research problems. The results of this study show that the construction of road infrastructure in Dumai City has not been done optimally, based on the selection of technology used, determination of authority, coordination, embodiment, and system management. The inhibitory factor in the construction of road infrastructure in Dumai City is the natural condition factor and the leader's policy factor. So that the PUPR Office or the relevant government can increase information openness through open access, in addition it needs to be improved the quality of coordination meetings when determining priority roads so that what has been set does not need to be re-enacted due to the policy of the leader.

Keywords: Strategy, Development, Road Infrastructure, Dumai City

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sebagai suatu daerah otonomi maka Kota Dumai memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring proses perkembangan terbentuknya Kota Dumai, sejogyanya perlu dilakukan upaya untuk memacu dan mengejar ketertinggalan pembangunan terkait dengan sektor Infrastruktur, Permukiman dan Perumahan visi Kota

Dumai ialah: **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur Dan Madani Pada Tahun 2021”** Visi tersebut dimaksud dicanangkan berdasarkan pada kondisi Kota Dumai yang memiliki nilai strategis sebagai Pintu Gerbang Pantai Sumatera, maka bagian yang paling dominan dalam meningkatkan Pembangunan adalah dibangunnya infrastruktur jalan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat serta menjamin suasana kehidupan yang memberikan rasa layak dan nyaman.

Untuk merealisasikan visi tersebut maka disusun lah misi pembangunan Kota Dumai. Salah satunya yaitu Misi Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan sumber pembangkit listrik; perluasan jaringan telekomunikasi; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; drainase; serta fasilitas umum perkotaan lainnya.

Pada penelitian ini peneliti terfokus pada salah satu pembangunan infrastruktur dasar yaitu pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai merupakan infrastruktur dasar yang penting untuk ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat sebab infrastruktur jalan, merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan masyarakat serta membuka akses penghubung antar daerah maupun antar wilayah sehingga menjamin kelancaran arus mobilitas orang maupun barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan

perekonomian daerah. Untuk merealisasikan misi tersebut maka misi ini diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan fisik Kota Dumai.

Adapun strategi yang telah disusun didalam Rencana Strategis Dinas PUPR untuk menunjang visi dan misi tersebut salah satunya yaitu: Mewujudkan jaringan jalan dan jembatan yang aman dan nyaman serta merata untuk mendukung arus lalu lintas barang/jasa. Kebijakan dalam mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai untuk merealisasikan strategi tersebut yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan
2. Peningkatan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota.

Kebijakan ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk mendorong perkembangan kota dumai ke arah sesuai dengan rencana strategis kota ke depan dengan mempertimbangkan dampak sebagai akibat perubahan kota yang cukup besar. Berdasarkan strategi dan kebijakan ini maka sudah seharusnya pembangunan infrastruktur jalan di kota dumai dikerjakan seoptimal mungkin mengingat rencana strategis merupakan kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk kedalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas.

Akan tetapi pada kenyataannya pembangunan infrastruktur jalan di kota dumai masih belum merata keseluruh wilayah, masih banyaknya masyarakat yang belum dapat menikmati pembangunan infrastruktur jalan tersebut,

dan Pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan hanya berkembang pesat di wilayah pusat. Berdasarkan data dan fenomena yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Strategi Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Dumai”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pembangunan infrastruktur jalan Di Kota Dumai?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis startegi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat hasil penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis
 1. Manfaat teoritis adalah sebagai bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan Studi Administrasi Publik.
 2. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
- b. Manfaat praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau solusi kepada

pemerintah instansi terkait, dan masyarakat tentang hal yang harus dilakukan dalam pembangunan infrastruktur jalan.

2. Sebagai bahan untuk masyarakat luas agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai.

c. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya program studi administrasi publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

KONSEP TEORI

2.1 Konsep Strategi

Menurut Chandler dan Rangkuti (2006:4) menyebutkan bahwa “strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan/organisasi, serta pendaya gunaan dan alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan”.

Menurut Michael E. Porter (2008) mengungkapkan bahwa strategi merupakan penciptaan posisi yang unik dan bernilai dengan menyertakan serangkaian aktivitas yang berbeda. Inti dari posisi strategis adalah memilih sejumlah aktivitas yang berbeda dari para kompetitor.

Selanjutnya, John A. Pearce dan Richard B. Roninson (2003) mendefinisikan strategi sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi serta implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan. Tujuan strategi organisasi publik sendiri adalah

menciptakan nilai dari masyarakat yang pada gilirannya akan menentukan arah organisasi kedepannya, sehingga organisasi sektor publik dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Sedangkan menurut Miles dan Snow dalam Heene (2010:79) ada beberapa kriteria pendekatan manajemen strategi dari strategi adaptif:

1. Pemilihan teknologi

Merupakan suatu cara atau sarana manusia dalam mengusahakan setiap barang-barang kebutuhan yang ingin dicapainya untuk keberlangsungan hidup manusia.

2. Penentuan kewenangan

Adalah hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain atau organisasi yang bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya.

3. Koordinasi

Sebagai suatu usaha kerjasama secara sinkron dan teratus serta mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan sehingga menghasilkan suatu tindakan yang harmonis untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

4. Perwujudan

Merupakan suatu yang nyata ataupun bisa dikatakan sebuah wujud dari pelaksanaan sebuah kegiatan.

5. Pengaturan sistem

Merupakan kesatuan bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak yang berada disuatu organisasi. Pengarahan sistem sama dengan sebuah mekanisme bagaimana suatu program itu dijalankan.

2.2 Konsep Pembangunan

Menurut Siagian dalam Mashur (2016:23) pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Selanjutnya Esman (2013:2) menyatakan bahwa dalam perkembangan pembangunan konsep pembangunan mengandung empat makna, yakni: (1) pembangunan merupakan suatu proses, dalam arti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan dan berkesinambungan. (2) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan, karena dipandang sebagai suatu kebutuhan. (3) pembangunan dilaksanakan secara berencana yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan. (4) pembangunan terkait dengan dimensi modernisasi, dalam arti sebagai cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Rostow (1966), pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu masyarakat yang terbelakang terhadap masyarakat yang maju. Proses ini dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Variasi yang ada bukan merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini melainkan hanya berlangsung di permukaan saja.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian tentang riset dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan subjek penelitian. Merujuk pada Creswell (2015).

Pendekatan studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen, dan berbagai laporan). Kemudian peneliti melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus yang dijadikan bahan penelitiannya. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian tersebut.

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena mendalami fenomena pembangunan infrastruktur jalan kota yang terjadi di kota Dumai. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian studi kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit tetapi ditinjau dari objek atau sifat penelitian maka penelitian studi kasus lebih mendalam. Adapun tujuan dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kota Dumai. Alasan pemilihan Kota Dumai karena semakin berkembangnya Kota Dumai sebagai kota yang memiliki nilai strategis sebagai pintu gerbang pantai Sumatera, maka bagian yang paling dominan dalam meningkatkan Pembangunan adalah dibangunnya infrastruktur jalan dan jembatan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu misi pembangunan Kota Dumai dan merupakan sasaran prioritas pembangunan kota Dumai. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai akan menjadi instansi yang dianalisis sebab kewenangan penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur jalan berada dibawah instansi ini.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan pilihan bahwa informan mengetahui informasi yang diperlukan. Adapun informan penelitian dapat lebih jelasnya dilihat sebagai berikut, yaitu:

1. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai.
2. Staf Pengawas Jalan Dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai
3. Staf Pelaksana Seksi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai
4. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang BAPPEDA Kota Dumai
5. Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi Dan Litbang BAPPEDA Kota Dumai

3.4 Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Dalam pengumpulan data primer yang didapatkan oleh peneliti selama melakukan observasi di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Dumai serta badan perencanaan dan pembangunan kota Dumai yaitu data yang

langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap pembangunan jalan yang terjadi di Kota Dumai. Data tersebut dipahami, diteliti dan diolah juga oleh peneliti sehingga menjadi data yang dapat lebih mudah di pahami oleh pembaca.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh peneliti dalam bentuk dokumen seperti keputusan walikota dumai Nomor 613 /Dpupr/2017 Tentang Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota, naskah tertulis seperti, rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai serta buku-buku, hasil laporan dan penelitian terdahulu (jurnal). Dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian seperti data pembangunan infrastruktur jalan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan pada periode bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan Juli tahun 2020. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih peneliti sebagai narasumber dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis terhadap informan penelitian untuk memperoleh data mengenai strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota

Dumai. Wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah ditetapkan sekaligus melakukan survei ke lokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata dilapangan. Hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dari narasumber yang berbeda-beda di analisis dan di pahami secara mendalam, setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan di dukung dengan hasil survei yang ditemukan di lapangan

2. Observasi

Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai oleh dinas terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai sebagai penanggung jawab. Dalam pengamatan ini diperkaya dengan data- data baik dalam bentuk tertulis maupun bentuk *soft copy* yang di dapatkan dari dinas-dinas terkait, data tersebut diteliti dan dipahami lebih mendalam lagi secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dirasakan dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut dikemas secara baik dan sederhana agar para pembaca mudah untuk memahaminya.

3. Dokumentasi

Data yang diambil selama melakukan proses observasi, wawancara dan survei bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dapat berupa file, foto dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif menurut *Miles and Huberman* dengan menggambarkan data yang didapatkan sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan teknik analisis data ini diharapkan mampu mengkaji permasalahan sehingga mampu menghasilkan temuan baru. adapun langkah-langkah dalam analisis data deskriptif kualitatif menurut *Miles and Huberman* yaitu:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti merangkum kembali semua data yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dipilih, disederhanakan, dan membuang data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian sehingga pada akhirnya mampu mendapatkan temuan baru.

2. Penyajian Data

Data yang telah melewati proses pemilihan, sudah disederhanakan dan disesuaikan dengan fokus penelitian selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif atau penjelasan berupa “uraian singkat” sehingga memudahkan untuk memahami data yang diperoleh. Selain memberikan penjelasan terkait data yang diperoleh, pada tahap ini peneliti juga memastikan kembali tidak ada data penting yang tertinggal. Setelah penyajian data selesai dilakukan maka peneliti melakukan pengolahan data ke tahap selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Tahap akhir dari model interaktif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban dari rumusan masalah dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai. Kemudian kesimpulan yang ditarik oleh peneliti memasuki proses verifikasi agar kesimpulan yang ditarik benar-benar kesimpulan final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Strategi Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Dumai

4.1.1. Pemilihan Teknologi

Pemilihan teknologi dalam menyusun strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai sudah ada yaitu dalam bentuk teknologi informasi. Teknologi Informasi adalah seperangkat alat perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan informasi. Alat teknologi informasi membantu dalam memberikan orang-orang informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Pemilihan teknologi dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai yaitu dalam bentuk sistem *e-planning* dan sistem LPSE.

Sistem *e-planning* mempermudah sistem perencanaan yang awalnya manual lalu menggunakan sistem, dengan cara merekap kegiatan-kegiatan yang bertautan, misalnya usulan-usulan prioritas kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan usulan dewan atau reses ternyata berada di jalan atau di lokasi yg sama, maka secara sistem akan terdata sama. Sedangkan sistem LPSE yaitu layanan pengadaan secara elektronik, yang secara singkatnya sistem ini sangat mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga dapat berjalan dengan lancar, lebih efisien, efektif, transparan, serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat diantara pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat terwujudkan sebagaimana semestinya. Alurnya sebelum di eksekusi ke SKPD pekerjaan - pekerjaan ini dimasukkan kedalam sistem LPSE mulai dari perencanaannya hingga pengerjaan

fisiknya agar lebih transparan dan akuntabilitas.

Akan tetapi dikarenakan lemahnya sumber daya manusia akan teknologi tersebut menyebabkan teknologi tersebut hanya dapat di akses oleh beberapa orang saja. Kurangnya keterbukaan informasi teknologi kepada masyarakat menyebabkan masyarakat buta akan perkembangan serta pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait juga menjadi alasan banyak dari masyarakat yang tidak tau adanya teknologi dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai. Itulah mengapa pemilihan teknologi dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai belum dilakukan secara optimal.

4.1.2. Penentuan Kewenangan

Penentuan kewenangan Adalah hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain atau organisasi yang bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dalam hal ini kewenangan dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai di Bidang Bina Marga untuk memerintahkan bagian-bagian yang bertindak untuk memaksa pelaksanaan strategi pembangunan di Kota Dumai. Penentuan kewenangan dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai sudah dilakukan secara optimal, dikarenakan strategi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, dan tujuan dalam penelitian ini merupakan pembangunan infrastruktur jalan. Untuk melaksanakan strategi tersebut maka dibutuhkan kewenangan atau tanggung jawab seseorang ataupun sebuah organisasi

dalam pelaksanaannya, maka dari itu penentuan kewenangan dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Hal ini sudah ditetapkan didalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataa Ruang Kota Dumai , dan yang bertanggung jawab atas pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Dumai Bidang Bina Marga. Dalam pelaksanaannya strategi pembangunan dan penentuan kewenangan tidak ada hambatan yang ditemukan, dikarenakan pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai SK yang telah ditetapkan.

4.1.3. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama secara sinkron dan teratur yang dilakukan oleh pelaksana pembangunan infrastruktur jalan dalam mengimplementasikan strategi pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kota Dumai sehingga menghasilkan suatu tindakan yang harmonis untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dalam pelaksanaan strategi maka kerjasama dari berbagai pihak sangat membantu dalam mempercepat penyelesaian tugas yang diberikan dengan harapan pekerjaan

tersebut dikerjakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan diakhir. Strategi pembangunan infrastruktur jalan dilakukan pengerjaan jalannya sudah dilakukan koordinasinya, secara singkatnya mulai dari tahap perencanaan yang menjadi tanggung jawab BAPPEDA, lalu ada Dinas PUPR sebagai pelaksana teknis dan pengawas jalannya pembangunan infrastruktur jalan tersebut, dan kontraktor sebagai pihak pelaksana pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai.

Koordinasi yang dilakukan pihak-pihak terkait biasanya dilakukan by phone saja, bisa melalui wa ataupun email. Selain itu pertemuan-pertemuan juga dilakukan untuk membahas setiap detail strategi pembangunan yang akan dilakukan serta melakukan rapat-rapat koordinasi yang dibutuhkan.

4.1.4. Perwujudan

Setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai membutuhkan perencanaan terlebih dahulu, setelah direncanakan kemudian dianggarkan, hasilnya dalam bentuk dokumen, yang disebut dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RENSTRA (Rencana Strategis), dan RENJA (Rencana Kerja). Dokumen-dokumen tersebut antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA). Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil dari tenokratik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), usulan masyarakat, pokok-pokok pikiran dewan melalui reses, dan kebijakan pimpinan. Hasil ini didapatkan melalui proses yang sangat panjang, mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan,

Musrenbang tingkat Kecamatan, dan Musrenbang tingkat Kota.

Pembangunan infrastruktur jalan akan diwujudkan sesuai dokumen-dokumen yang telah ditetapkan tersebut. Setelah perencanaanya selesai, maka selanjutnya masuk kedalam tahap penganggaran, dan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, saat pelaksanaan maka pengerjaan pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan saat perencanaan sebelumnya, dan setiap pengerjaan harus tetap dikontrol dan diawasi.

Akan tetapi perwujudan dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai, belum dilakukan secara optimalnya. Pelaksanaan strategi pembangunan yang ada belum dapat mengatasi permasalahan yang muncul seperti masih adanya jalan-jalan yang belum tersentuh pembangunan atau pembangunan yang belum dilakukan secara merata dan optimal menjadi alasan mengapa perwujudan dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan belum dilakukan secara optimal dan belum terasa nyata. Padahal setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai pengerjaan pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan saat perencanaan sebelumnya, dan setiap pengerjaan harus tetap dikontrol dan diawasi.

4.1.5. Pengaturan Sistem

Pengaturan sistem merupakan kesatuan bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item pergerakan yang berada disuatu organisasi. Pengaturan sistem sama dengan sebuah mekanisme bagaimana suatu program itu dijalankan. Didalam strategi pembangunan infrastruktur jalan berarti pengarahan sistem sama dengan sebuah mekanisme

bagaimana suatu program itu dijalankan. Artinya strategi pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Dumai harus sesuai dengan unsur-unsur yang berkaitan seperti perencanaan, pelaksanaan atau pengimplementasian, hingga pengawasan atau monitoring dan evaluasi.

Pengaturan sistem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai, tidak dapat dilepas kaitan dengan fisik, karena bicara pembangunan berarti bicara fisik. Fisik disini maksudnya ialah proses strategi pembangunan tersebut tidak terlepas dari pekerjaan yang dilakukan secara teknis atau fisik. Pekerjaan tersebut berupa pembangunan infrastruktur jalan yang pengaturan sistemnya dimulai dari sistem perencanaan, penganggaran, lalu pengimplementasian, hingga evaluasi.

Dimulai dari tahap perencanaan yang dimulai dari memasukan usulan dari masyarakat ke dalam Musrenbang, lalu hasil musrenbang akan dimintai persetujuan dari berbagai pihak terkait seperti BAPPEDA, DPRD, dan Sekda, usulan tersebut selanjutnya dituang kedalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), setelah semua setuju mulai dilakukan pengadaan/penunjukan langsung konsultan perencana. Selanjutnya masuk kedalam tahap pelaksanaan yang dimulai dengan melakukan lelang/pengadaan pelaksanaan kontraktor, lelang yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan pemenang tender atau proyek pembangunan dimana pemenang harus sudah siap untuk melakukan kegiatan pembangunan berdasarkan SPMK (Surat Perintah Memulai Kerja), dimana kontraktor inilah yang akan melakukan pembangunan jalan, dalam melakukan pekerjaannya maka langsung masuk

kedalam tahapan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas dan beberapa pihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai dapat lebih terarah.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya strategi pembangunan ini belum dapat terlaksana atau terimplementasikan secara optimal, sering kali apa yang sudah direncanakan tidak sesuai pengimplementasiannya, maka dari ini pengawasan sangat dibutuhkan dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai.

4.2 Faktor-Faktor Penghambat Strategi Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Dumai

4.2.1 Faktor Kebijakan Pemimpin

Dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai, maka tidak dapat terlepas dari peran pemimpin didalamnya. Sebuah perencanaan dan penganggaran yang telah disusun membutuhkan persetujuan dari pemimpin agar dapat ditetapkan rencana dan anggarannya. Kalau diperlukan maka pemimpin dapat mengeluarkan dokumen surat keputusan sesuai kebutuhan publik saat itu demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Faktor kebijakan pemimpin dapat memperhambat strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai, lebih tepatnya dalam waktu pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Kebijakan pemimpin merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan pemimpin ini dapat berbentuk

keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak. Dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai, maka tidak dapat terlepas dari peran pemimpin didalamnya. Sebuah perencanaan dan penganggaran yang telah disusun membutuhkan persetujuan dari pemimpin agar dapat ditetapkan rencana dan anggarannya. Kalau diperlukan maka pemimpin dapat mengeluarkan dokumen surat keputusan sesuai kebutuhan publik saat itu demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai sudah melewati berbagai tahapan, dimulai dari musrenbang hingga reses dewan. Walikota Dumai sebagai pemimpin maka berhak mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai. Akan tetapi terkadang kebijakan dari pemimpin tersebut dapat mempengaruhi jalannya suatu pembangunan, salah satunya yaitu dalam perencanaan strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai yang telah ditetapkan perencanaan dan penganggaran sebelumnya harus terintegrasi kembali, karena kebijakan dari pemimpin yang ingin membangun suatu jalan yang dimana jalan tersebut merupakan akses masyarakat dan sarana pendidikan, maka dari itu perencanaan yang awalnya sudah ditetapkan, mau tidak mau harus terintegrasi kembali. Untuk mengintegrasikan kembali maka semua itu harus dirapatkan dan dikoordinasikan kembali, mulai dari tahap perencanaannya hingga tahap penganggarannya.

Apabila hasil akhir dari kebijakan walikota jalan tersebut memang diharuskan untuk dibangun pembangunan infrastruktur jalannya, maka akan

dilakukan pengerjaan jalannya. Hal ini tentu saja akan berdampak pada jalan-jalan yang sebelumnya sudah ditetapkan pembangunan jalannya, jalan-jalan tersebut nanti ada yang tidak dilakukan pengerjaan pembangunan jalannya atau akan diusulkan dan dikerjakan pada tahun berikutnya bila di rasa butuh. Dalam mengintegrasikan kembali suatu perencanaan maka membutuhkan waktu yang tidak sedikit, maka dari itu pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai pengerjaannya terkadang tidak sesuai dengan perencanaannya. Hal ini menjadi salah satu penyebab strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai belum dapat dikerjakan secara optimal.

4.2.2 Faktor Kondisi Alam

Faktor kondisi alam juga menjadi penentu dalam pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai. Strategi yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya berbenturan dengan kondisi alam Kota Dumai yang tidak mendukung. Strategi pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kota Dumai dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan terbenturnya dengan kondisi alam Kota Dumai yang tidak mendukung. Dilihat dari kondisi topografinya yang relative datar, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah. Lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut. Karakter negatif lahan gambut ini memiliki bahan organik yang tinggi, volume udara tanah yang besar

dan mudah menyerap air sehingga akan mengurangi daya tekan dan daya beban.

Pembangunan infrastruktur jalan di lahan gambut memang membutuhkan teknologi khusus dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kondisi geografis Kota Dumai yang sebagian besar rawa besar, secara teknis membutuhkan teknologi khusus dan pembiayaan yang besar, sebagian besar jalan yang ada di Kota Dumai itu tidak cocok dengan jenis aspal dan bahkan beton pun patah. Jadi saat ini memang dibutuhkan teknologi tepat guna, sumber daya yang mendukung, serta anggaran yang besar. Selain itu, Kota Dumai yang sebagian besar lahannya merupakan kawasan hutan atau konsesi menyebabkan terhambatnya strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai.

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur jalan yang telah direncanakan serta pembangunannya telah dilaksanakan terpaksa pengerjaannya berhenti di tengah jalan diakibatkan pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan tersebut mengenai kawasan hutan Kota Dumai. Kawasan hutan tersebut sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. Kasus yang terjadi seperti ini mengakibatkan mengapa strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai belum dilaksanakan secara optimal dan pembangunan infrastruktur jalannya belum dilakukan secara merata.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pembangunan

infrastruktur jalan di Kota Dumai dengan informasi yang telah didapatkan dari informan penelitian melalui riset dan wawancara serta telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka penelitian mengenai strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai belum dilakukan secara optimal dikarenakan, pertama, pemilihan teknologi dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai sudah ada dalam bentuk *e-planning* dan LPSE akan tetapi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi ini dapat dikatakan belum dilakukan secara optimal dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi dan kurangnya sosialisasi dari pemda terkait. Selain itu teknologi tersebut hanya dapat diakses oleh beberapa orang saja. Kedua, kriteria perwujudan dalam strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai, belum dilakukan secara optimal. Pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur jalan belum dapat mengatasi permasalahan yang ada, dapat dilihat dari masih adanya jalan-jalan yang belum tersentuh pembangunan atau pembangunan yang belum dilakukan secara merata.

Kriteria koordinasi pada strategi pembangunan infrastruktur jalan dalam pelaksanaannya pihak-pihak terkait melakukan koordinasi biasanya *by phone*. Selain itu pertemuan-pertemuan dan rapat koordinasi juga dilakukan sekiranya memang dibutuhkan. Kriteria penentuan kewenangan dan pengaturan sistem dalam pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai hanya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan.

2. Ditemukan faktor-faktor yang menghambat dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai, diantaranya:

1. Faktor Kebijakan Pemimpin
2. Faktor Kondisi Alam

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan Strategi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Dumai sebagai berikut :

1) Sebaiknya pemerintah daerah memberikan sosialisasi terkait pemanfaatan sistem *e-planning* dan membuat *e-planning* yang *open access* kepada masyarakat, sehingga sistem ini dapat diakses oleh siapapun. Pelaksanaan strategi pembangunan harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama dengan pengawasan yang ketat. Alangkah baiknya setiap kerjasama atau koordinasi yang dilakukan memiliki atau dilakukan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang ada sehingga setiap pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Dumai dapat terimplementasikan dengan optimal.

2) Sebaiknya sebelum dokumen rencana kerja strategi pembangunan infrastruktur jalan telah selesai disusun, ada baiknya meningkatkan kualitas rapat koordinasi dalam penentuan jalan prioritas, sehingga tidak ada lagi jalan tambahan yang harus dibangun diluar jalan prioritas yang telah ditetapkan. Ada baiknya jika setelah dokumen rencana kerja tersebut ditetapkan langsung disahkan dan dikeluarkan surat keputusannya. Hal ini akan mengurangi jarak yang terjadi saat pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan tidak sesuai dengan perencanaan.

Selain itu ada baiknya melakukan *survei location* terlebih dahulu sehingga diharapkan tidak ada lagi strategi pembangunan infrastruktur jalan yang terhenti pengerjaannya karena pembangunan tersebut memasuki kawasan hutan atau konsesi.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2016. *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Selemba Empat

Creswell, J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Fred R David, 2004 *Manajemen Strategi*, diterjemahkan oleh Krisno Saroso. Gramedia. Jakarta.

Heene Aime, dkk. 2010. *Manajemen Strategi Keorganisasian Publik* : PT Regika Aditama

Mashur D. 2017. *Administrasi Pembangunan*. Pekanbaru: UR Press

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Westra, Pariata. 1983 *Manajemen Pembangunan Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Arsyad F. *Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan*, Sie Infokum-Ditama Binbangkum <https://www.academia.edu/8345726/>

Asariansyah M. Faisal, Saleh C, Rengu P. Stefanus. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan*

- Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Cahya C. Indra 2018. *Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung
- Fithra H, Tantawi. 2017. *Strategi Pengelolaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Aceh Utara*. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Malikussaleh
- Rahmat M, Yuliani F. *Strategi Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. Fisip, Universitas Riau
- Aini, Nurul, 2014, *Strategi Pengembangan Objek Wisata Unggulan Happanas Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Rokan Hulu*, FISIP, Universitas Riau
- Ardianto A. Rifki. 2009. *Strategi Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Peranannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat*. Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Institute Pertanian Bogor
- Barasa, Feriyanti, 2018. *Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru*, FISIP, Universitas Riau
- Iek M. *Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Di Distrik Ayamaru, Aitinyo Dan Aifat)*. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Cendrawasih
- Mayliza. 2019. *Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai Di Kabupaten Rokan Hulu*. FISIP, Universitas Riau
- Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Dumai. 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kota Dumai
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai. Rencana Strategis 2016-2021. Kota Dumai
- Keputusan Walikota Dumai Nomor 613 /Dpupr/2017 Tentang Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai